

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Pemilihan umum atau pemilu merupakan suatu indikator bagi negara-negara demokrasi menuju negara yang demokratis, sebab negara memberikan kesempatan bagi warganya untuk dapat menentukan siapa yang akan memimpin di negaranya atau perwakilannya di lembaga parlemen. Dan berangkat dari hal tersebut praktik pemilu sebagai bentuk demokrasi mensyaratkan warga negaranya untuk dapat ikut terlibat atau berpartisipasi memberikan suaranya dalam pemilu. Output dari hasil pemilu itu sendiri diharapkan mampu melahirkan pemimpin yang secara demokratis sesuai dengan kehendak masyarakat itu sendiri, serta bergantung pada partisipasi, kritik, dan juga pemikiran rasional rakyat. Oleh karena itu, partisipasi pemilih merupakan suatu kebutuhan demi tetap berlanjutnya demokrasi agar sistem politik tidak terhambat. Pemilu yang merupakan bagian penting atau komponen utama dalam demokrasi, juga merupakan instrumen yang menjembatani suara-suara rakyat yang berdaulat untuk memberikan mandat terhadap seseorang sebagai wakil rakyat atau pemimpin yang akan duduk dalam pemerintahan (Hafidz, 2019).

Menurut Miriam Budiardjo kegiatan partisipasi masyarakat dalam politik dapat diartikan sebagai seseorang maupun sekelompok orang yang aktif dalam politik, yaitu dengan memilih pemimpin negara dan juga secara langsung atau tidak langsung dapat berimplikasi terhadap kebijakan pemerintah negara (Mulyadi, 2019).

Partisipasi politik masyarakat pada Pemilihan Umum akan sangat menentukan arah dan kemajuan suatu bangsa. Kualitas partisipasi politik sangatlah ditentukan oleh seluruh masyarakat yang memenuhi syarat wajib hak pilih mereka yang telah dapat memberikan hak suaranya dalam pemilihan, serta diberikan kemudahan dalam memilih pemimpin yang benar-benar berkualitas,

yang didasarkan pada keyakinan dan juga kepercayaan masyarakat kepada kualitas calon yang telah dipilih (Liando, 2016).

Indonesia telah melaksanakan pemilu sejak tahun 1955 yang berlangsung pada era Orde lama, kemudian berlanjut pada era orde baru yang berlangsung sejak tahun 1971 hingga 1997. Pada era orde baru atau pada masa rezim Soeharto, pemilu semuanya dimenangkan oleh Golongan Karya atau dapat dikatakan bahwa pemilu pada saat itu hanyalah upaya rezim untuk memberikan informasi kepada negara lain bahwa Indonesia telah melaksanakan pemilu yang demokratis dan rezim pemerintahan orde baru digambarkan telah terbentuk secara demokratis, padahal praktik demokrasi yang ada tidak berjalan sama sekali. Dan dapat dikatakan kebijakan politik yang dijalankan oleh era orde baru telah menjauhkan partisipasi politik rakyat. Partisipasi rakyat telah dikontrol dan juga dikerahkan negara ke dalam wilayah tertentu (kebijakan fusi, golkar, dan *floating mass*) sehingga termobilisasi secara paksa atau partisipasi yang dimobilisasi (Ilmar, 2017).

Seiring runtuhnya era Orde Baru dan berjalannya era Reformasi di Indonesia, transformasi yang terjadi terkait dengan praktik kehidupan berdemokrasi di Indonesia terus mengalami perubahan situasi politik yang berkembang, tak dapat dipungkiri, pemilu tahun 1999 merupakan titik awal kebebasan berdemokrasi berkembang di Indonesia. Melalui Undang-Undang No. 3 Tahun 1999 tentang pemilu 1999, jumlah partai politik di Indonesia pada saat itu terus bertambah jika dibanding dengan jumlah partai yang ada pada era Orde Baru, terdapat 48 partai politik yang ikut berpartisipasi dalam pemilu 1999, yang kemudian diikuti dengan pemilu berikutnya pada tahun 2004 yang memilih Presiden dan Wakil Presiden secara langsung, serta anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) (Masyrofah, 2013). Di era reformasi, bingkai transparansi diartikulasikan sebagai partisipasi yang bermakna keterlibatan masyarakat dalam suatu proses politik. Akan tetapi, seiring berjalannya pemilu pada era reformasi nyatanya masih terdapat celah atau gap yang berimplikasi pada naik dan turunnya angka partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum. Hal tersebut

tentunya dapat disebabkan oleh partisipasi politik yang masih dianggap hanya sebagai wacana belaka, tanpa mengetahui bentuk, dampak, dan juga implementasi dari partisipasi itu sendiri.

Tabel 1.

**Tingkat Partisipasi Pemilih Pada Tingkat Nasional dan Provinsi Pada
Pemilu Tahun 2004-2019**

Tahun	TINGKAT NASIONAL				TINGKAT PROVINSI DKI				
	DPR	DPD	PILPRES PUTARAN I	PILPRES PUTARAN II	DPR	DPR D	DPD	PILPRES PUTARAN I	PILPRES PUTARAN II
2004	84,1 %	84,1 %	79,76%	77,4%	76,06 %	76,06 %	76,06 %	77,41%	74,47 %
2009	71%	71%	72,09%		58,04 %	58,04 %	58,04 %	67,87%	
2014	75,11 %	75,11 %	69,58%		66,5 %	66,5 %	66,5 %	72,3%	
2019	78,74 %	78,74 %	82%		78,41 %	78,36 %	78,49 %	79,23%	

Sumber 1: Diolah dari kpu.go.id

Tingkat partisipasi pemilih masyarakat Indonesia pada masa reformasi ini sangatlah fluktuatif yang disebabkan oleh adanya gap partisipasi pemilih antara pemilu periode sebelumnya dengan pemilu setelahnya. Secara nasional pemilu di Indonesia mengalami fluktuasi pada pemilu tahun 2004 hingga tahun 2014 baik dari pemilu legislatif maupun pemilu Presiden dan Wakil Presiden, akan tetapi pada pemilu tahun 2014 hingga ke tahun 2019 meningkat sebesar 3,63% pada pemilu legislatif dan juga mengalami kenaikan sebesar 12,42% pada pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Pada tingkat provinsi DKI Jakarta juga demikian terjadi fluktuasi pemilu periode sebelumnya dengan pemilu setelahnya, akan

tetapi pada pemilu tahun 2019 mengalami kenaikan pada pemihan anggota DPR RI sebesar 11,91%, pemilihan DPRD sebesar 11,95%, dan pemilihan DPD RI sebesar 11,86%, serta pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebesar 6,93% bila dibandingkan dengan pemilu tahun 2014.

Tabel 2.

**Tingkat Partisipasi Pemilih Kotamadya Provinsi DKI Jakarta Pada
Pemilu Tahun 2014-2019**

Kota Adm.	Pemilu Tahun 2014				Pemilu Tahun 2019			
	DPR	DPRD	DPD	Pilpres	DPR	DPRD	DPD	Pilpres
Kep. Seribu	72,52%	72,52%	72,52%	73,57%	75,10%	74,80%	75,97%	82%
Jakarta Timur	69,7%	69,7%	69,7%	75,42%	79,85%	79,80%	80%	80,46%
Jakarta Barat	65,64%	65,64%	65,64%	70,6%	79,52%	79,39%	79,43%	80,03%
Jakarta Selatan	64,6%	64,6%	64,6%	71,63%	78,48%	78,43%	78,51%	79,65%
Jakarta Pusat	64,3%	64,3%	64,3%	70,26%	76,94%	76,91%	77,10%	78,06%
Jakarta Utara	65,9%	65,9%	65,9%	71,89%	75,99%	75,90%	76,04%	76,52%

Sumber 2: Diolah dari kpu.go.id

Tingkat partisipasi masyarakat kota Administrasi Jakarta Barat, apabila dikomparasikan dengan kota-kota lain di provinsi DKI Jakarta. Kota Administrasi Jakarta Barat dalam hal tingkat partisipasi pemilih pada pemilu tahun 2014 dan 2019, masih lebih baik apabila dibandingkan dengan kota Administrasi Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan Jakarta Utara. Pada pemilu tahun 2019 dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, kota administrasi Jakarta Barat 3,22% lebih tinggi apabila dibandingkan dengan kota Jakarta Utara yang

memiliki tingkat partisipasi terendah dalam lingkup Provinsi DKI Jakarta. Akan tetapi, tingkat partisipasi memilih kota Administrasi Jakarta Barat masih lebih rendah bila dibandingkan dengan Kep. Seribu dan kota Administrasi Jakarta Timur dalam tingkat partisipasi memilih pada pemilu legislatif dan pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 dan 2019. Pada pemilu legislatif tahun 2019 di Jakarta Barat bila dibandingkan dengan pemilu tahun 2014 pada pemilihan DPR RI terjadi kenaikan sebesar 13,88%, kemudian pada pemilihan DPRD DKI Jakarta terjadi kenaikan sebesar 13,75%, dan pada pemilihan DPD RI terjadi juga kenaikan sebesar 13,79%. Hasil tersebut bila dikalkulasikan pada pemilu legislatif, tingkat partisipasi masyarakat kota administrasi Jakarta Barat jumlahnya naik secara signifikan dengan angka rata-rata sebesar 13,80%. Kemudian pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 di kota Administrasi Jakarta Barat, bila dibandingkan dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 tingkat partisipasinya naik secara signifikan sebesar 9,43%. Jumlah tersebut cukup signifikan karena masyarakat kota Administrasi Jakarta Barat merupakan kota dengan jumlah masyarakat terbesar kedua di Provinsi DKI Jakarta, dengan jumlah penduduk berdasarkan data BPS pada tahun 2018 jumlahnya sebesar 2.559.362 penduduk. Jumlah tersebut tentunya lebih besar bila dibandingkan dengan jumlah penduduk Kep. Seribu yang hanya sebesar 24.134 penduduk (BPS, 2019).

Pemilihan umum pada tahun 2019 merupakan pemilihan legislatif dan juga pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang diadakan secara bersama atau serentak. Menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi atau MK Nomor 14 tahun 2013 mengenai ikhwal pemilihan umum secara serentak, dengan tujuannya untuk meminimalisir biaya tinggi dari pemilu, mencegah politisasi yang dimainkan birokrasi dan merampingkan skema pemerintah, serta mencegah praktik politik uang dan penyakit demokrasi lainnya. Pemilu Serentak tahun 2019 juga diharapkan sebagai ajang masyarakat dalam menyampaikan kedewasaan politiknya melalui partisipasi memilih dalam pemilihan umum. Tingkat

partisipasi masyarakat dalam Pemilu menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan dalam demokrasi. Dalam suatu sistem politik demikian, terwujudnya demokrasi substansial tidak dapat terlepas dari peran Komisi Pemilihan Umum yang menjadi pondasi dalam penyelenggaraan Pemilu yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien, hingga tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota. Peran tersebut dimaknai mulai dari tahap awal hingga akhir termasuk pada tahap sosialisasi dan edukasi pemilih yang merupakan salah satu tugas KPU (Sukmajati & Perdana, 2019). Komisi Pemilihan Umum atau KPU merupakan suatu lembaga yang memiliki peran yang sangat penting dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat secara langsung dan juga dapat meyakinkan masyarakat bahwa bentuk partisipasi mereka dalam pemilu merupakan hal penting dalam terlaksananya pemerintahan kedepannya. Peran KPU tertuang dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum pada pasal 12 poin J disebutkan bahwa “KPU bertugas mensosialisasikan penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat”. Lebih lanjut lagi disebutkan juga didalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU Nomor 10 Tahun 2018 tentang sosialisasi, pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan umum, yang dimana dalam pasal ke-empat disebutkan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh KPU bertujuan untuk menyebarluaskan informasi mengenai tahapan, jadwal dan program Pemilu, meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat terkait hak dan kewajiban dalam Pemilu, serta meningkatkan partisipasi Pemilih dalam Pemilu.

KPU sebagai penyelenggara pemilu tidak hanya bertindak sebagai juri yang mengamankan berlangsungnya kontestasi pemilihan saja, akan tetapi KPU juga bertugas untuk mensosialisasikan pemilihan umum kepada masyarakat, sehingga KPU memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan partisipasi pemilih dalam masyarakat, termasuk KPU kota administrasi Jakarta

Barat yang terus berupaya meningkatkan kualitas mereka sebagai upaya untuk meningkatkan angka partisipasi masyarakat kota administrasi Jakarta Barat, seperti peningkatan SDM, penyusunan regulasi, meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu, dan situasi politik yang terjadi di tengah masyarakat menjelang pemilihan umum akan berlangsung.

Dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilihan umum, KPU menyiapkan strateginya, yang telah tertuang dalam rencana strategis KPU 2015-2019. Di antaranya adalah dengan membaginya kedalam beberapa segmentasi, seperti partisipasi pemilih masyarakat secara umum dalam pemilihan, partisipasi pemilih perempuan dalam pemilihan, partisipasi pemilih disabilitas dalam pemilihan, pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih, pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih tetap, dan indeks kepuasan publik terhadap penyelenggara pemilu. Upaya peningkatan partisipasi yang terbagi kedalam beberapa segmentasi tersebut dapat dilakukan sebagai bentuk sosialisasi pendidikan politik dan juga pembentukan relawan demokrasi.

Gambar 1.

Pembentukan Relawan Demokrasi oleh KPU Kota Administrasi Jakarta Barat



Sumber 3: Diolah dari laman Kompas.com tahun 2019

KPU kota administrasi Jakarta Barat juga terus melakukan upaya sosialisasi pemilu baik secara offline maupun secara online melalui perangkat

media sosial. Tidak hanya itu KPU kota administrasi Jakarta Barat juga membentuk program relawan demokrasi demi meningkatkan partisipasi masyarakat dengan menempatkan mereka sebagai pelopor demokrasi di lingkungannya. Dari pembentukan tersebut KPU kota administrasi Jakarta Barat merekrut 55 orang relawan demokrasi dari setiap segmentasi yang akan berfokus pada pemilih netizen, perempuan, keagamaan, marjinal, disabilitas dan lainnya (Wahyuningrum, 2019). Tidak hanya itu, KPU juga menyelenggarakan konser musik sebagai bentuk sosialisasi pemilu dan juga mengadakan kampanye lomba selfie di TPS pada platform media sosial Instragram KPU kota administrasi Jakarta Barat.

Gambar 2.

Sosialisasi Pendidikan Pemilih Berdasarkan Basis Oleh KPU Kota Administrasi Jakarta Barat



Sumber 4: Diolah dari Instragram KPU Kota Administrasi Jakarta Barat @kpu.jakartabaratan tahun 2019

Permasalahan dan tantangan juga harus dihadapi KPU kota administrasi Jakarta Barat dalam upaya mereka untuk meningkatkan angka partisipasi masyarakat dalam pemilu, karena dalam pemilu serentak tahun 2019 kali ini cukup berbeda dimana masyarakat harus mengisi empat surat suara dalam satu hari pemilihan, kemudian sebagian masyarakat juga masih menyimpan

pesimisme terhadap pemilu, sebagian masyarakat masih kesulitan dalam menggunakan hak pilih mereka yang dilandaskan pada nalar yang benar, karena rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, kemudian munculnya fenomena politik uang, maraknya pembelahan politik yang didasarkan pada suku, agama, ras, dan antar kelompok (SARA), dan juga berkembangnya perilaku kampanye hitam yang tidak sesuai aturan yang berlaku. Kampanye hitam lebih banyak terjadi pada pemilihan calon Presiden dan Wakil Presiden yang dilakukan pada platform media sosial seperti facebook, Instagram, dan juga Twitter selama pemilu serentak tahun 2019 berlangsung. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ferdinand Eskol Tiar Sirait, kampanye hitam jelas memiliki potensi negatif yang cukup buruk bagi demokrasi. Kampanye hitam yang dilakukan segelintir orang akan meningkatkan apatisme masyarakat terhadap pemilu dan ini tentu saja akanberimplikasi terhadap menurunnya minat masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilu. Secara umum, pada akhirnya kampanye hitam ini berpotensi mendelegitimasi hasil pemilu dan proses demokrasi di negeri ini. (Sirait, 2020) Sehingga diperlukan peranan penting maupun strategi khusus dari Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga yang ditugaskan untuk menyelenggarakan pemilu untuk melindungi hak pilih masyarakat dan juga meningkatkan tingkat partisipasi memilih masyarakat, seperti melalui sosialisasi pemilu. Dan hal inilah yang menjadi salah satu ketertarikan peneliti mengenai seberapa efektifkah strategi politik yang diselenggarakan KPU kota administrasi Jakarta Barat pada pemilu serentak tahun 2019.

Menganalisa terkait strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota Administrasi Jakarta Barat untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilihan Umum serentak 2019 sangatlah menarik untuk di teliti lebih jauh lagi. Di tengah situasi politik di Indonesia yang terus berkembang, partisipasi masyarakat dalam pemilu tentunya masih menarik perhatian tersendiri. Mengingat pemerintah sendiri melakukan berbagai upaya untuk dapat

meningkatkan partisipasi pemilih di Indonesia. KPU dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN, menargetkan setidaknya partisipasi pemilih pada pemilu serentak 2019 sebesar 77,5%. Dari target tersebut tingkat partisipasi pemilih masyarakat kota administrasi Jakarta Barat setidaknya sudah sedikit melebihi dari target capaian tersebut, pada pemilu legislatif tingkat partisipasi masyarakat kota administrasi Jakarta Barat jumlahnya naik secara signifikan dengan rata-rata sebesar 13,33%, dan pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 di kota Administrasi Jakarta Barat yang tingkat partisipasinya juga naik secara signifikan sebesar 9,12%. Strategi politik yang dilakukan oleh KPU kota administrasi Jakarta Barat dalam meningkatkan partisipasi pemilih menarik untuk dibahas lebih lanjut, karena apakah tingginya partisipasi pemilih disebabkan oleh pendidikan pemilih dan sosialisasi pemilu yang dilakukan oleh KPU kota administrasi Jakarta Barat sudah terbilang efektif? peningkatan angka partisipasi pemilih pada masyarakat kota administrasi Jakarta Barat terbilang meningkat signifikan karena jumlah masyarakatnya berdasarkan data BPS pada tahun 2018 yang mencapai 2.559.362 jiwa. Sepanjang tahun 2019 menjelang pemilihan, pemerintah terus gencar dan masif dalam mensosialisasikan pemilu, kepada masyarakat termasuk juga pemilih pemula dengan harapan nantinya akan ada proses transfer pengetahuan terkait pendidikan politik yang akan membentuk pemilih yang cerdas dan rasional. Perlu diperhatikan bahwa pelaksanaan strategi KPU menjadi penting dalam penyelenggaraan pemilihan umum demokratis yang akan menghasilkan pemimpin yang seratus persen dikehendaki rakyat (Debora, 2019). Kemudian dalam penelitian ini, nantinya diharapkan dapat bernilai positif dan menjadi tolak ukur bagi penyelenggara pemilu dalam menghadapi pemilu mendatang, yaitu pemilu serentak tahun 2024 agar pemilihan terus berjalan demokratis dan juga terjadi peningkatan tingkat partisipasi pemilih masyarakat dalam pemilihan.

Terdapat beberapa kajian penelitian terdahulu yang dapat mendukung penelitian peneliti:

Penelitian Pertama yang menjadi rujukan adalah artikel ilmiah yang berjudul “**Strategi KPU Kota Serang Untuk Meningkatkan Partisipasi Pemilih Dalam Pilkada Provinsi Banten Tahun 2017**” yang ditulis oleh Satrio Sakti Darmawan (2018). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan mengenai bagaimana strategi KPU kota Serang untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pilkada Banten tahun 2017. Hasil penelitian tersebut menggunakan teknik analisis SWOT yang dapat diketahui bahwa KPU kota Serang menggunakan beberapa strategi yang digunakan sebagai upaya untuk meningkatkan angka partisipasi pemilih, dengan meningkatkan kerjasama antara anggota KPU kota Serang dalam melaksanakan Pilkada Banten 2017, meningkatkan pemahaman pegawai KPU melalui bimbingan teknis dan juga pelatihan berkelanjutan demi meningkatkan kualitas kinerja dalam pelaksanaan Pilkada Banten 2017. Berdasarkan penelitian tersebut sudah sangat baik dalam hal menjelaskan Peran KPU kota Serang dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Satrio Sakti Darmawan (2018) dengan penelitian peneliti adalah sama-sama membahas terkait Strategi KPU tingkat kota dalam meningkatkan angkat partisipasi pemilih dalam pemilihan umum. Sementara itu, perbedaannya adalah pada penelitian yang dilakukan oleh Satrio (2018) lebih berfokus pada analisis isu strategi dengan berdasarkan analisis SWOT, sedangkan penelitian peneliti lebih memfokuskan pada strategi politik menurut, khususnya strategi ofensif dan defensif yang dilakukan KPU kota administrasi Jakarta Barat.

Kedua, artikel ilmiah yang telah ditulis oleh Eni Lestari dan Garmien Mellia (2020) yang berjudul “**Peran KPU Kota Metro Dalam Meningkatkan Partisipasi Penyandang Disabilitas Pada Pemilu Serentak Tahun 2019**”. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang telah menjadi penyebab rendahnya partisipasi pemilih penyandang disabilitas, serta untuk mengetahui peran KPU Kota Metro dalam upayanya untuk meningkatkan

partisipasi pemilih penyandang disabilitas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terjadi hambatan yang dihadapi dalam hal ini masih bersifat administratif dan juga psikologis yakni berkaitan dengan adanya kesulitan dalam pendataan pemilih penyandang disabilitas, lalu sosialisasi yang belum optimal, dan juga belum adanya wadah resmi yang menaungi seluruh penyandang disabilitas di Kota Metro. Berdasarkan penelitian tersebut sudah sangat baik dalam hal menjelaskan Peran KPU kota Metro untuk meningkatkan partisipasi pemilih penyandang disabilitas sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan UU dan PKPU namun diperlukan adanya dukungan kelembagaan lain untuk menunjang pendataan yang lebih valid serta sosialisasi yang lebih intensif.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Eni Lestari dan Garmien Mellia (2020) dengan penelitian peneliti adalah sama-sama membahas mengenai strategi KPU. Sementara itu, perbedaannya adalah penelitian Lestari & Mellia (2020) lebih berfokus pada partisipasi pemilih penyandang disabilitas, sedangkan penelitian peneliti lebih memfokuskan pada strategi politik, khususnya strategi ofensif dan defensif yang dilakukan KPU kota administrasi Jakarta Barat.

Ketiga, merupakan artikel yang ditulis oleh Desak Putu Adistyaningsih dan Anak Agung Gede Oka Wisnumurti (2019) dengan judul “**Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Gianyar**”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat strategi apa yang lebih dominan digunakan oleh KPU kabupaten Gianyar untuk meningkatkan partisipasi politik. Kemudian, hasil dari ini penelitian ini adalah pelaksanaan strategi komunikasi KPU dapat dikatakan berhasil dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih, karena jumlah partisipasi politik masyarakat Gianyar yang mencapai 81%. Sosialisasi yang dilakukan oleh KPU terkait informasi dan motivasi terhadap masyarakat dinilai tepat sasaran meskipun terdapat hambatan terkait strategi komunikasi berbasis digital dengan menggunakan media elektronik yang belum terjangkau luas.

Berdasarkan penelitian tersebut sudah sangat baik dalam hal menjelaskan Peran KPU Gianyar untuk meningkatkan partisipasi pemilih melalui strategi komunikasi KPU yang telah dilaksanakan.

Persamaan penelitian yang dilakukan Adistyaningsih dan Wisnumurti (2019) dengan penelitian peneliti adalah sama-sama membahas strategi KPU. Sementara itu, perbedaannya adalah penelitian peneliti lebih memfokuskan pada strategi politik, khususnya strategi ofensif dan defensif yang dilakukan KPU kota administrasi Jakarta Barat.

Keempat, merupakan artikel dari BIRCI-Journal yang ditulis oleh Dedi Amrizal, Yusriati, Hermansyah Lubis (2018) dengan judul *“The Role of General Election Commission (KPU) in Increasing "Voters" Participation in Langkat, Medan, Indonesia”*. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat peran KPU Langkat untuk meningkatkan partisipasi pemilih melalui sosialisasi pemilu yang telah dilakukan. Karena dalam hal ini Tingginya tingkat partisipasi pemilih akan menunjukkan keberhasilan pemilu dan rendahnya partisipasi pemilih akan menunjukkan kegagalan pemilu. Hasil penelitian tersebut menunjukkan. Sosialisasi pemilu yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Langkat belum efektif dimana pencapaian tujuan, prosedur, anggaran, infrastruktur dan integrasi tidak efektif dan pemanfaatan sumber daya dan fasilitas belum berjalan secara efektif. Sehingga hasil dari penelitian ini adalah peran KPU Langkat dalam meningkatkan pemilih belum maksimal. Dengan tingkat partisipasi pemilih yang rendah sekitar 60% diperoleh dari pengolahan data KPU Kabupaten Langkat. Berdasarkan penelitian tersebut sudah sangat baik dalam hal menjelaskan Peran KPU Langkat untuk meningkatkan partisipasi pemilih melalui skema sosialisasi yang telah dilaksanakan.

Persamaan penelitian yang dilakukan Amrizal, DKK (2019) dengan penelitian peneliti adalah sama-sama membahas strategi KPU. Sementara itu, perbedaannya penelitian peneliti lebih memfokuskan pada strategi politik,

khususnya strategi ofensif dan defensif yang dilakukan KPU kota administrasi Jakarta Barat.

Kelima, merupakan artikel ilmiah yang ditulis oleh Rifail Khair Harefa dan Abrar Adhani (2021) dengan judul “*The role of the general election commission to increase community political participation in the 2020 general election of Medan city*”. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat peran KPU Medan dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat kota Medan di tengah pandemi covid 19 dalam Pilkada serentak 2020. Hasil dari penelitian ini adalah KPU Kota Medan berperan dalam membina partisipasi masyarakat dalam politik khususnya dalam Pilkada Kota Medan dari KPU mengenai jadwal pelaksanaan, pendaftaran, dan pendataan pemilih. Serta, melakukan sosialisasi dengan komunikasi tatap muka melalui media massa, media sosial, media kreatif, papan pengumuman KPU, dan sebagainya. Berdasarkan penelitian tersebut sudah sangat baik dalam hal menjelaskan peran KPU kota Medan terhadap upaya meningkatkan partisipasi pemilih melalui upaya komunikasi dengan sosialisasi yang dilakukan oleh KPU kota Medan.

Persamaan penelitian yang dilakukan Harefa dan Adhani (2021) dengan penelitian peneliti adalah sama-sama membahas strategi KPU. Sementara itu, perbedaannya penelitian Harefa dan Adhani (2021) lebih memfokuskan pada upaya komunikasi yang dilakukan oleh KPU sebagai langkah untuk meningkatkan partisipasi pemilih, sedangkan penelitian peneliti lebih memfokuskan pada strategi politik, khususnya strategi ofensif dan defensif yang dilakukan KPU kota administrasi Jakarta Barat.

Keenam, merupakan artikel dari BIRCI-Journal yang ditulis oleh Sarino, Erwan Efendi, dan Anang Anas Azhar (2021) dengan judul “*The General Election Commission (KPU) Communication Model in Increasing Voter Participation in the Election of the Governor of Sumut 2018 in Labuhanbatu Selatan District*”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui model komunikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Meningkatkan Partisipasi

Pemilih dalam Pemilihan Gubernur Sumut 2018. Hasil penelitian ini adalah KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan akan mendata Daftar Calon Pemilih Tetap yang akan diberikan sosialisasi. KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam hal ini melakukan sosialisasi terkait pemilu kepada siswa SMA, nelayan dan petani, serta memperkuat relasi dengan ormas untuk mempermudah sosialisasi dengan masyarakat umum. KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan menggunakan metode Tanya Jawab, masyarakat mengajukan pertanyaan terkait tata cara dan seterusnya baru petugas menjawab atau sebaliknya. Berdasarkan penelitian tersebut sudah sangat baik dalam hal menjelaskan peran KPU terhadap upaya meningkatkan partisipasi pemilih lewat model komunikasi.

Persamaan penelitian yang dilakukan Sarino, Erwan Efendi, dan Anang Anas Azhar (2021) dengan penelitian peneliti adalah sama-sama membahas strategi KPU. Sementara itu, perbedaannya dengan penelitian Sarino, DKK (2021) lebih memfokuskan pada upaya komunikasi yang dilakukan oleh KPU sebagai langkah untuk meningkatkan partisipasi pemilih, sedangkan penelitian peneliti lebih memfokuskan pada strategi politik, khususnya strategi ofensif dan defensif yang dilakukan KPU kota administrasi Jakarta Barat.

Ketujuh, merupakan artikel yang ditulis oleh Roso Prajoko (2017) dengan judul “*General Election Commission and Non-Voting Behavior (GOLPUT): An Analysis from Political Communication Perspective*”. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menjelaskan faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab perilaku tidak memilih oleh konstituen pada pemilukada di Kabupaten Sragen tahun 2015. Data yang disebutkan dalam penelitian tersebut diketahui besaran angka golput pada pemilukada saat itu cukup besar. Jumlah itu mencapai sekitar 29,3 persen orang yang terdaftar sebagai pemilih tetap. Dan hasil dari penelitiannya adalah, terdapat empat alasan non pemilih dalam Pilkada 2015 di Sragen, yaitu Faktor kepentingan warga, Faktor penyebaran informasi pemilu oleh KPU kabupaten Sragen, Aktor politik atau figur calon, dan Faktor kekecewaan warga. Komunikasi politik dari KPU

kabupaten Sragen, Partai Politik dan Komunitas/Organisasi lainnya kepada masyarakat/konstituen dalam rangka mempengaruhi perilaku politiknya. Diketahui terjadi penurunan angka golput yang cukup signifikan, karena poin utama untuk menjawab hasil penelitian adalah dengan cara membangkitkan rasa empati masyarakat untuk meningkatkan partisipasi politiknya melalui pendidikan politik dalam berbagai manifestasinya. Berdasarkan penelitian tersebut sudah sangat baik dalam hal menjelaskan strategi KPU dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih serta menurunkan angka golput.

Persamaan penelitian yang dilakukan Roso Prajoko (2017) dengan penelitian peneliti adalah sama-sama membahas strategi KPU. Sementara itu, yang menjadi pembeda dengan penelitian Prajoko (2021) memfokuskan pada perspektif komunikasi politik yang dilakukan oleh KPU sebagai langkah untuk meningkatkan partisipasi pemilih melalui, sedangkan penelitian peneliti lebih memfokuskan pada strategi politik, khususnya strategi ofensif dan defensif yang dilakukan KPU kota administrasi Jakarta Barat.

Dalam beberapa penelitian terdahulu yang menjadi penopang dalam penelitian ini, setidaknya terdapat pembaharuan daripada penelitian sebelumnya, karena dalam penelitian ini berlokasi pada masyarakat kota administrasi Jakarta Barat dan akan berfokus pada strategi politik Peter Schröder, secara khusus terhadap strategi ofensif dan strategi defensif yang dilakukan oleh KPU kota administrasi Jakarta Barat.

I.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, rumusan masalah dari penelitian ini yaitu, Bagaimana strategi yang dilakukan KPU kota administrasi Jakarta Barat untuk meningkatkan angka partisipasi pemilih dalam pemilihan umum serentak 2019?

I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan juga rumusan masalah yang telah dibahas sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana strategi penyelenggaraan pemilu yang dilakukan oleh KPU kota administrasi Jakarta Barat dalam usaha untuk meningkatkan angka partisipasi pemilih dalam pemilihan umum serentak tahun 2019. Tujuan lain secara rinci dijelaskan, sebagai berikut:

I.3.1 Tujuan Praktis

Secara praktis tujuan dari penelitian ini diharapkan mampu berdampak praktis terhadap praktik di lapangan terkait upaya KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih dalam suatu pemilihan umum, secara khusus bagi pemilu serentak tahun 2024 dan juga bagi penyelenggara pemilu lainnya di dunia.

I.3.2 Tujuan Teoritis

Tujuan dari penelitian ini terkait upaya KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih diharapkan mampu berdampak terhadap pengembangan disiplin ilmu pengetahuan, khususnya ilmu politik.

I.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini sekiranya diharapkan dapat memberikan manfaat, untuk:

1) Manfaat Akademis

Dapat menjadi referensi dan juga memberikan manfaat bagi pembaca khususnya mahasiswa maupun mahasiswi ilmu politik mengenai penyelenggaraan strategi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum kota Administrasi Jakarta Barat untuk menaikkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu serentak tahun 2019.

2) Manfaat Praktis

Memberikan manfaat secara praktis dalam pengetahuan kepada masyarakat mengenai upaya strategi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan angka partisipasi pemilih

masyarakat dalam Pemilihan Umum dan juga sebagai acuan bagi KPU untuk menghadapi pemilu serentak tahun 2024.

I.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam proposal penelitian ini sebagai berikut:

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam bab pertama ini akan menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah atau pertanyaan penelitian yang akan serta digunakan, tujuan penelitian, serta sistematika penulisan. Dan juga memaparkan penelitian-penelitian terdahulu yang akan digunakan dalam penelitian yang berisi persamaan dan juga perbedaan antara penelitian peneliti dengan penelitian terdahulu sehingga terlihat kebaruan dari penelitian yang akan diteliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan berisi penjelasan terkait teori dan konsep yang akan digunakan, serta kerangka berpikir penelitian.

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

Pada bab ini menguraikan metode penelitian yang akan digunakan terdiri dari jenis penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data, teknik analisis data, serta waktu dan lokasi penelitian.

BAB IV

PEMBAHASAN

Pada bab ini akan berisikan penyajian data yang menampilkan lokasi penelitian, tugas dan wewenang KPU sebagai bahan dari data fokus penelitian, analisis data penelitian yang menampilkan partisipasi dan juga perencanaan strategi yang dilakukan oleh KPU kota

administrasi Jakarta Barat, serta hasil penelitian yang memuat temuan-temuan yang ditemukan dari hasil penelitian.

BAB V

PENUTUP

Pada bab penutup ini akan berisi kesimpulan peneliti terkait pembahasan yang telah dilakukan dalam penelitian dan juga saran yang merupakan isi alternatif yang akan di pakai sebagai upaya untuk mengatasi kelemahan terkait penelitian.

DAFTAR PUSTAKA Pada bagian ini mencakup daftar referensi yang akan digunakan oleh peneliti untuk menyusun proposal penelitian skripsi.